

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin canggih, dan diikuti oleh perkembangan perekonomian di dunia yang kini tumbuh dengan pesat, hal ini ditandai dengan kemajuan perekonomian di negara maju maupun negara berkembang seperti yang dialami Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi ini mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir ini adanya dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian.

Pada tahun 2018 dalam jalur merupakan tahun yang menjadi tahun pertama sejak krisis keuangan dimana ekonomi global akan beroperasi mendekati atau pada kapasitas penuh. Pelemahan ekonomi diperkirakan akan hilang. Pembuat kebijakan perlu melihat kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan jangka pendek dan mempertimbangkan hal-hal yang mungkin meningkatkan potensi jangka panjang.

Indonesia memiliki sektor perbankan sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian di Indonesia selain bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, maupun masyarakat luas. Perbankan juga memiliki peranan yang tidak kalah penting penting di masa sekarang ini, dimana seluruh dunia merasakan adanya pandemic Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara global, maka dari itu peranan perbankan juga salah satu yang dibutuhkan dalam membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan baik melalui restrukturisasi kredit maupun dengan penyaluran kredit baru.

Tantangan utama perbankan saat ini adalah bagaimana menjaga kualitas kredit agar tidak berujung dengan kredit macet atau *non performing loan* (NPL) yang mana pada saat ini Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat hingga 3,1 persen pada 2018 setelah pertumbuhan ekonomi pada 2017 jauh lebih kuat dari perkiraan, akibat pemulihan berlanjut pada investasi, manufaktur, dan perdagangan, dan juga negara-negara berkembang yang mengeksport komoditas mendapatkan keuntungan dari menguatnya harga komoditas. Hal ini sebagian besar dilihat sebagai kemajuan jangka pendek yang di sampaikan oleh Bank Dunia pada bulan Januari 2018 dalam laporan *economic prospect global*.

Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelum terjadi pandemi Covid-19 ekonomi dunia sedang dalam keadaan optimisme yang cukup tinggi. Hal itu lantaran adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Sikap optimisme itu sirna ketika datang wabah pandemic covid-19 yang muncul sehingga memberikan tekanan perekonomian global luar biasa. Adanya pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Pada tahun 2020 seluruh dunia tak terkecuali Indonesia mengalami penurunan ekonomi secara besar-besaran karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat.

Perekonomian dunia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan yang tajam, karena banyak Negara yang menerapkan sistem *lockdown*. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan sektor perbankan. Ketika sektor perbankan suatu negara terpuruk maka perekonomian secara nasional nya akan ikut terpuruk. Gejala ekonomi yang di akibatkan oleh pandemi covid-19 di rasakan di Indonesia dampaknya lebih buruk dibandingkan dengan pada saat terjadi krisis finansial global pada tahun 2008/2009.

Krisis finansial global yang pernah terjadi masih mampu membuat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,1%, sedangkan di masa pandemic covid-19 ini perekonomian Indonesia di tahun 2020 kuartal I hanya tumbuh sebesar 2,97%. Memasuki kuartal Ke-II tahun 2020, perlambatan ekonomi semakin terasa, setelah di umulkannya diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dampak dari diberlakukannya PSBB ini membuat sejumlah sector terpaksa harus memberhentikan sejumlah pekerja dalam skala besar. Hal ini menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan terancam keberlangsungan hidupnya, sehingga menimbulkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi menjadi sebesar 5,32% di kuartal ke-II.

Sepanjang tahun 2020 hingga akhir tahun , Empat bank dengan modal terbesar yang sudah menerbitkan laporan keuangan, dimana tahun-tahun ini merupakan tahun penuh tantangan di tengah krisis pandemic Covid-19, dimana kinerja dunia perbankan banyak mengalami penurunan kinerja yang dapat di lihat dari laba yang di peroleh oleh beberapa contoh bank-bank besar seperti, Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Mandiri, dan Bank Central Asia (BBCA). Berdasarkan sisi laba bersih, keempat bank tersebut mengalami penurunan sepanjang 2020 di banding 2019.

Bank Central Asia dalam hal ini masih mengantongi nilai unggul dengan perolehan laba bersih senilai Rp.27,13 triliun meski angka ini sebenarnya turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,02% secara tahunan. Bank Rakyat Indonesia mengantongi laba bersih sebesar Rp. 18,66 triliun, nilai ini sangat turun hingga 45,78% secara tahunan. Bank Mandiri mengantongi laba sebesar Rp.17,11 triliun, nilai ini turun sebesar 37,71% dari tahun sebelumnya. Bank Negara Indonesia mengantongi laba sebesar Rp.3,28 triliun atau anjlok sebesar 78,68%.

Turunnya profitabilitas bank-bank tersebut disebabkan kenaikan pencadangan atau provisi masing-masing bank. Cadangan kerugian penurunan nilai ini merupakan penyisihan dana yang dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan debitur oleh masing-masing bank. BBCA melakukan pencadangan senilai Rp.11,6 triliun pada tahun 2020. BBRI melakukan pencadangan dengan nilai hingga Rp.32,85 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 44,33% di banding tahun 2019. Bank Mandiri juga melakukan pencadangan Rp.22,89 triliun pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 89,66% dari tahun sebelumnya, BBNI sendiri mengalami kenaikan pencadangan sebesar Rp.22,59 triliun atau sekitar 155,6% di banding tahun sebelumnya.

Pencadangan terhadap perbankan perlu dilakukan, karena tahun 2020 bank-bank melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap nasabah yang bisnisnya terdampak Covid-19. BBKA misalnya melakukan restrukturisasi kredit senilai Rp.97,5 triliun sepanjang tahun 2020. BBRI juga mencatat restrukturisasi kredit melonjak senilai Rp.186,6 triliun nilai ini naik drastis di mulai sejak bulan maret 2020. Bank Mandiri mencatat per akhir desember 2020 menyetujui nilai restrukturisasi kepada nasabahnya senilai Rp.123,4 triliun. Restrukturisasi kredit di BBNI mencapai Rp.102,38 triliun per akhir desember 2020. Kualitas yang tercermin dalam raasio kredit macet atau *Non Performing Loan (NPL)* masing masing bank mengalami kenaikan. Kredit macet BBKA pada tahun 2020 ada di level 1,8% yang sebelumnya hanya 1,3%. Kredit macet di BBRI ada di level 2,99% atau naik dari 2,8%. Kredit macet lainnya, seperti Bank Mandiri mengalami kenaikan menjadi 3,1% pada tahun 2020 dari sebelumnya hanya 2,3%, sedangkan posisi kredit macet BBNI berada di level 4,3% atau mengalami kenaikan dari sebelumnya hanya 2,3% di tahun 2019.

Perbankan Nasional masih akan menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka Panjang maupun structural. Tantangan jangka pendek seperti ketidakpastian kapan akan berakhir pandemic Covid-19 yang masih membayangi proses pemulihan perekonomian di Indonesia yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu terdapat tantangan structural perbankan yang masih harus di hadapi mengenai skala usaha dan daya saing yang masih kecil.

Sektor perbankan sendiri menjalankan kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus dipelihara. Perbankan Nasional juga memiliki tugas dalam meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus memiliki manajemen yang baik dan menjaga profitabilitasnya supaya dapat meningkatkan permodalan. Dengan mengetahui kinerja yang dicapai, maka bank dapat menilai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya sehingga bank dapat menentukan strategi untuk masa yang akan datang, maka dari itu kinerja keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian prestasi suatu perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Setelah

mengalami masa keterpurukan dalam pendapatan laba yang merosot secara drastis pada tahun 2020 , berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya membuahkan hasil, keadaan ekonomi mulai mengalami pemulihan pada akhir tahun 2021, salah satunya di buktikan dengan mulai bangkitnya bank-bank himbara (himpunan bank usaha milik negara).

Keempat bank tersebut yang telah melakukan pembukuan laba bersih konsolidasi menembus hingga 78,2 triliun. Melihat hal ini tentu saja membawa kabar gembira untuk para pemegang saham, karena dividen yang akan di bagikan cukup besar. Meskipun demikian pemerintah akan tetap terus melakukan berbagai upaya agar keadaan kinerja perbankan terus meningkat, salah satunya adalah dengan berusaha menekan angka penularan Covid-19 dengan terus menggalakan vaksin di masyarakat, dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang semakin berkurang diharapkan keadaan ekonomi akan segera membaik.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Laba di Indonesia (year on year)

Tahun	Laba (Triliun Rupiah)	Presentase (%)
2017	77,2	19,1%
2018	83,7	Meningkat 5%
2019	91,5	Meningkat 7,8%
2020	71,3	Menurun 20,2%
2021	78,2	Meningkat 6,9%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) , 2022

Penilaian kinerja keuangan terhadap sektor perbankan merupakan salah satu faktor yang penting bagi perbankan untuk melihat bagaimana bank tersebut dalam melakukan kinerjanya apakah sudah baik atau belum dan penilaian juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas atau keuntungan. Sebagai perusahaan sektor keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, perbankan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks dalam tujuan memperoleh laba yang maksimal. Tingkat laba dinilai sangat penting karena untuk melangsungkan hidup suatu bank haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan untuk dapat bersaing dengan

kompetitor perbankan lainnya maupun kompetitor dari perusahaan fintech yang sedang marak berkembang. Para direktur, pemilik, dan pihak manajemen akan berusaha meningkatkan keuntungan karena menyadari akan pentingnya laba bagi masa depan bank. Salah satu yang dapat dilakukan oleh perbankan itu sendiri adalah dengan menjaga kualitas kerja dalam internal bank, terutama dalam hal peningkatan kinerja keuangan perbankan.

Perusahaan-perusahaan besar biasanya mencantumkan kondisi resiko yang di hadapi dan bagaimana mereka menghadapinya, yang biasanya di terbitkan di dalam laporan tahunan (*Annual Report*) yang mereka terbitkan. Sejumlah perbankan biasanya akan mengalami beberapa risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional. Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Indikator yang digunakan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*), menurut Kasmir (2014), LDR adalah rasio yang mengukur besarnya kredit yang di berikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat atau modal yang sendiri yang di gunakan.

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk kredit yang nantinya akan memberikan kontribusi pendapatan bunga. Akan tetapi, terdapat juga risiko yang di timbulkan oleh perkreditan yaitu kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah akan menimbulkan kerugian karena tidak di terima nya kembali dana yang telah di salurkan maupun pendapatan bunga sehingga terjadinya penurunan pendapatan oleh bank itu sendiri. Indikator yang di gunakan adalah NPL (*Non Performing Loan*).

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan bank kepada debitur. Risiko yang terakhir yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal seperti kesalahan manusia, kegagalan system atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi bank. Untuk risiko operasional di ukur dengan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Bank). Pengelolaan risiko yang baik saja tidak cukup menggambarkan baiknya kinerja perbankan jika

tata kelola dalam perbankan belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan perbankan adalah dengan cara menerapkan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Dilansir dari Bisnis.com, kasus penyaluran kredit PT Bank Mayapada International Tbk. yang melebihi ketentuan dimasukkan dalam catatan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019. Catatan tersebut merupakan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dijadikan objek pemeriksaan BPK. Ada beberapa catatan terkait bank berkode MAYA dalam audit tersebut, seperti uji kemampuan dan kepatutan direksi yang tidak mempertimbangkan pelanggaran penandatanganan kredit di perusahaan. Selain itu, BPK juga menyoroti kredit bermasalah (NPL), underlying transaksi terkait aliran dana dari rekening debitur ke simpanan atas nama komisaris utama Bank Mayapada dan indikasi pelanggaran Batas Maksimum Kredit (BMPK). Saat ini banyak dibicarakan pelanggaran BMPK. Pasalnya, nilai kelebihan BMPK mencapai Rp23,56 triliun. Jumlah kredit ini hanya disalurkan kepada empat debitur. Rincian penerima kredit adalah kelompok HI (BT) sebanyak 57 debitur senilai Rp. 12,39 triliun, SB (M) kelompok 14 debitur sebesar Rp. 3,13 triliun, kelompok IL (HSG) 16 debitur sebesar Rp. 4,74 triliun, dan kelompok M (T) sebanyak 11 debitur sebesar Rp. 3,3 triliun. Sedangkan modal inti perusahaan sebesar Rp 10,42 triliun. Dengan rata-rata BMPK 20 persen dari modal inti, penyaluran kredit maksimal Rp 2 triliun. Akibat pelampauan penyaluran kredit ini, menurut informasi Bisnis, pemegang saham diminta menambah modal dan menutupi kekurangan kewajiban. Tahir mengalokasikan dana tunai Rp1 triliun, dan aset bangunan Rp3,5 triliun. Sedangkan sisanya dipenuhi dalam bentuk AYDA sebesar Rp 17,9 triliun dari debitur terkait. Dengan permasalahan tersebut, OJK telah meminta action plan. Salah satunya dengan mengeksekusi aset yang digunakan untuk menambal 'lubang' tersebut. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, kasus pelanggaran BMPK Bank Mayapada merupakan temuan pihak berwenang yang kemudian masuk dalam catatan BPK. Berdasarkan temuan OJK, kata dia, perbaikan dilakukan dengan

meminta pemegang saham melakukan sejumlah tindakan. "Jadi ini temuan OJK yang disorot dalam audit BPK, bagaimana penanganannya. Jadi bukan temuan baru," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/7/2020). Dalam action plan tersebut, kata dia, OJK meminta perbankan menjaga kecukupan likuiditas, dengan menyerahkan sebagian asetnya, seperti gedung yang nilainya mencapai Rp. 3,5 triliun. Menurutnya, karena aset bangunan tidak likuid, butuh waktu untuk melakukan penjualan. Penjualan gedung sudah termasuk dalam rencana aksi. Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tersebut di anggap menyalahi aturan yang seharusnya dijalankan dan harus bertanggung jawab atas tindakannya karena di takutkan nya akan merugikan banyak pihak jika tidak dibenahi selanjutnya.

Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral sangat memberi perhatian khusus terhadap penerapan sistem tata kelola atau *good corporate governance* (GCG) dan manajemen risiko . Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur penerapan standar GCG bagi bank umum di Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi PBI Nomor 8/14/PBI/2006, dan dilengkapi dengan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/15/DPNP pada 29 April 2013 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan implementasi manajemen risiko perbankan untuk mengontrol risiko yang dihadapi perbankan melalui PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum (Agus Setiawaty, 2016).

Penerapan *governance good corporate* mutlak diperlukan oleh suatu organisasi, mengingat GCG merupakan kunci dari kinerja perusahaan dalam mencari laba dalam waktu jangka Panjang dan memperoleh hasil yang baik ,hal ini dapat membantu membangun kepercayaan pemegang saham dan memastikan bahwa semua pemangku diperlakukan sama. Sistem yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan investasi mereka secara wajar, tepat, efisien, dan memastikan bahwa manajemen bertindak untuk keuntungan perusahaan (Agus suryanto,2019). Menurut Forum *Corpoorate Governance on Indonesia, corporate governance* atau tata Kelola perusahaan

adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Mekanisme GCG pada penelitian ini diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dari sebuah bank, sebagian atau seluruhnya, akan berdampak pada perekonomian suatu negara karena perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terhadap GCG ini sudah banyak dilakukan sebelumnya, hanya saja masih banyak yang menunjukkan inkonsistensi terhadap hasil akhir yang diperoleh seperti yang dilakukan oleh Farooque (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hasil yang berbeda di dapatkan oleh Nilayanti dan Suaryana (2019) di tahun yang sama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya yaitu pada Setiawan (2016) menghasilkan data bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hermayanti dan Suaryana (2019) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Indikator yang terakhir yaitu proporsi dewan komisaris independent yang dinyatakan positif terhadap kinerja keuangan hasil dari penelitian Mulyadi (2017), dan berbeda pula dengan penelitian oleh Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independent berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.

Risiko dari kegagalan sebuah bank bukan hanya menimbulkan dampak bagi perekonomian, tetapi juga bagi yang berhubungan langsung dengan perbankan seperti para pemegang saham. Keterpurukan perbankan bukan saja disebabkan dari lemahnya implementasi *good corporate governance*, tetapi juga dapat disebabkan oleh lemahnya manajemen risiko pada perbankan tersebut. Perseroan mulai menyadari akan pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam dunia bisnis

yang semuanya serba tidak pasti dan untuk meningkatkan nilai perseroan bagi pemangku kepentingan dengan memenuhi prinsip GCG.

Fenomena lain yang terjadi pada bank-bank besar sepanjang tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, salah satu bank ber skala besar juga mengalami beberapa permasalahan seperti yang terjadi pada PT Bank Bukopin pada tahun 2021 berganti nama menjadi KB Bukopin setelah sebagian saham PT Bank Bukopin di akuisisi sebesar 67 % oleh bank asal korea selatan KB Kookmin Bank. Hal ini dilakukan oleh direktur utama Bank Bukopin demi menuju transformasi terhadap kinerja perusahaan lebih baik lagi. Setelah adanya pengambil alihan saham tersebut Bank Bukopin menunjukkan kinerja yang lebih positif, khususnya dalam permodalan, perbaikan proses internal , dan pengawasan. Dengan adanya proses akuisisi ini diharapkan bisa mendukung kegiatan operasional serta menjadi bantalan untuk pengelolaan risiko kredit.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun alasan meneliti kembali penelitian ini adalah masih banyaknya ketidakkonsistenan dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini juga menambahkan kepemilikan manajerial sebagai variabel independent dan juga menambahkan variabel moderasi sebagai variabel yang nantinya akan memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan pada penelitian kali ini peneliti melakukan uji terhadap hasil menggunakan bantuan Software WarPLS v 7.0 hal ini juga merupakan perbedaan penelitian ini dengan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang menggunakan alat uji SPSS sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Hal ini sesuai dengan saran dari penelitian-penelitian terdahulu

Penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian adalah sector perbankan. Adapun alasan peneliti memilih sector perbankan karena sector perbankan merupakan salah satu sector yang diharapkan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang, karena sector perbankan merupakan salah satu sector yang mempunyai peran yang cukup besar dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara serta melihat dari kegiatan sehari-hari masyarakat yang tidak terlepas dari jasa yang diberikan oleh perbankan.

Manajemen risiko yang bertindak sebagai variabel moderasi diharapkan akan semakin memperkuat hubungan antara GCG dengan kinerja keuangan, manajemen risiko dalam penelitian ini ditunjukkan dengan risiko kredit, dimana risiko kredit diproyeksikan dengan Non Performing Loan (NPL) (Wahyuni (2012). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit. Hal ini telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dasar peraturan Nomor 4/ POJK.03/ 2016. Apabila nilai NPL tinggi maka akan menyebabkan penurunan laba yang akan diterima oleh bank dan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Sulistiawati dan Umi Muawanah, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?
4. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021?
5. Apakah manajemen risiko mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?
6. Apakah manajemen risiko mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?
7. Apakah manajemen risiko mampu memoderasi hubungan antara proporsi dewan komisaris independent dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah proporsi dewan komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.

4. Untuk memberikan bukti empiris apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5. Untuk memberikan bukti empiris manajemen risiko memoderasi hubungan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.
6. Untuk memberikan bukti empiris manajemen risiko memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.
7. Untuk memberikan bukti empiris manajemen risiko memoderasi hubungan proporsi antara dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Dengan melakukan penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas bagi peneliti dalam melakukan penelitian pengaruh manajemen risiko dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan manajemen risiko sebagai variabel moderasi.
2. Bagi Investor
Diharapkan menjadi salah satu informasi, acuan, dan masukan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal sehingga untuk dimasa yang akan datang investor dapat lebih lebih selektif lagi.
3. Bagi Perbankan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pengaruh manajemen risiko dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, guna mengetahui pengelolaan keuangan perusahaan dan juga sebagai alat pengambilan keputusan di bidang keuangan.
4. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan mampu mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan.